

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi mayoritas masyarakat Indonesia sebagai negara yang luas yang memiliki kekayaan sumber daya alam terkandung didalamnya. Berbagai hasil yang keluar dari perut bumi Indonesia, mulai dari minyak bumi, gas, batubara, nikel dan emas. Kekayaan alam tersebut sangat bernilai strategis bagi kehidupan bangsa bukan hanya sebagai sumber energi, sumber penerimaan devisa negara tetapi juga sebagai pendongkrak industri dan petrokimia. Dengan kata lain, minyak bumi dan gas bukan hanya sebagai “pelumas” utama dalam pembangunan nasional tetapi menjadi komoditas utama seiring dengan peningkatan ekonomi dan pengembangan industri dalam negeri.¹

Namun, pada kenyataannya warga Indonesia justru bukanlah sang penikmat utama atas segala kekayaan tersebut, melainkan jugadinikmati oleh orang asing. Salah satu kekayaan alam di Indonesia adalah gas dan minyak bumi. Melihat potensi Indonesia dari segi kekayaan alamnya yang lebih daripada beberapa negara lain. Sehingga tidak mengherankan jika banyak pihak asing tergiur dan bergerak untuk menjadikan Indonesia sebagai ladang bisnis mereka. Realitas tersebut terlihat dengan begitu banyaknya korporasi-korporasi asing di Indonesia mendominasi, seperti yang dijelaskan pada gambar dibawah ini:

¹RiyandaniRahmadiyahLioty (2017). *Journal of Internvtional Relations*, Volume 3, Nomor 4, hal. 96-105. Online di <http://ejournal-s1.undip.Ac.id/index.php/jihi>



Gambar 1.1 Peta kepemilikan AS dan Negara lain²

Terlihat dari gambar di atas dapat disimpulkan adanya keterkaitan pemerintah dengan pemilik modal dalam mengatur dunia pasar, ekonomi telah menjadi dinamika yang sudah sejak lama terjadi dalam pergejolan politik dan ekonomi. Politik acap kali diidentifikasi dengan keputusan pemerintah yang bersifat otoritatif dimonopoli oleh pemerintah.

Sebaliknya, ekonomi dalam pandangan non-marxist, ekonomi selalu dikaitkan dengan keputusan berdasarkan mekanisme pasar, yang terakhir ini berasumsi individu bertindak menurut kehendak bebas dan pilihan rasional, sedangkan yang pertama berasumsi individu tidak selalu bertindak bebas.³

Selain itu, dalam ekonomi pilihan (keputusan) yang dibuat oleh elit dianggap terlepas dari faktor-faktor lain. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan untung rugi secara langsung saja. Beberapa pilihan memiliki

²Peta kepemilikan AS dan Negara lain, www.sumberbpmigas, diakses pada 15 Oktober 2019

³Ramlan Surbakti. (2005). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Grasindo, hal. 205.

dampak terhadap faktor lain yang tidak terlibat dalam keputusan. Namun, dalam ekonomi hal ini dianggap sebagai faktor eksternal yang tidak perlu dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Konsekuensinya, struktur pasar tidak lagi ditentukan oleh kondisi obyektif yang melibatkan aktor-aktor pasar, melainkan diarahkan oleh kepentingan partisan pejabat sebagai pencari sekaligus pemburu rente ekonomi.⁴

Dalam politik, keputusan dibuat melalui interaksi di antara berbagai kelompok dan pemerintah (dengan menggunakan setiap sumber kekuasaan) dalam konteks struktur kelembagaan yang ada. Struktur kelembagaan akan mempengaruhi perilaku dari individu elit politik karena struktur tersebut menentukan bagaimana keputusan dibuat, siapa yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan sarana-sarana apa yang tersedia untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu. Dengan kata lain, studi ekonomi-politik menaruh perhatian terhadap keberadaan yang parallel dan saling interaksi antara “Negara” dan “pasar”.⁵

Ekonomi Politik merupakan disiplin teoritis, ilmu mengenai dalil-dalil ekonomi dan politik yang berhubungan satu sama lain. Dalil (hukum) ekonomi berupa: koneksi-koneksi atau hubungan-hubungan yang acap kali berulang dari tindakan-tindakan manusia yang kompleks, secara kontemporer juga terjadi karena perkembangan sejarah suatu masyarakat, sehingga kegiatan tersebut berulang-ulang dengan cara yang khas dan memiliki pola ketertibannya sendiri.

⁴Nur Sayyid, SantosoKristeva, *Kapitalisme, Negara dan Masyarakat*, hal. 8

⁵Kacung Marijan. (2010). “*Sistem Politik Indonesia, konsolidasi demokrasi pasca-orde-baru*”. Kencana Prenada media group, hal. 264

Ini berkenaan dengan penyelidikan atas hubungan-hubungan yang teratur dan berulang-ulang antara unsur-unsur sistematis dalam proses ekonomi dan politik.⁶

Hubungan politik dengan ekonomi bersifat sebagai interaktif atau timbal balik, sedangkan teori yang lain lagi menggambarkan hubungan politik dengan ekonomi sebagai perilaku yang berkesinambungan. Termasuk ke dalam kategori yang terakhir ini berupa aliran ekonomi politik baru atau perspektif *public choice* yang berupaya menerapkan asumsi, bahasa dan logika ekonomi neoklasik ke dalam perilaku politik.

Realitas dan Fakta pada praktek pengolahan sumber daya alam pada tingkat nasional banyak dikelola dan dikuasai oleh korporasi asing. Sebaliknya, praktek pengolahan pada tingkat daerah dimana lebih banyak diolah secara tradisional yang dikuasai warga setempat. Praktek-praktek penambangan minyak bumi telah tersebar luas diseluruh wilayah Indonesia dengan konsep tradisional antara lain, Laut Natuna, Batam, Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan perbatasan Indonesia-Timur Leste.⁷

Oleh karena itu, kondisi dari eksploitasi pemilik modal kekayaan di Indonesia sangat bertolak belakang dengan konstitusi dasar Republik Indonesia, yaitu UUD 1945, pada pasal 33 ayat 3 dijelaskan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan

⁶Yanuar Ikbar (2007). “*Ekonomi Politik Internasional 2*”. Bandung : Refika Aditama, hal. 115

⁷Rio Heykhal Belyage (2016). “*Strategi penambangan minyak tradisional di tengah meluasnya control negara dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Indonesia*”. Volume, 18 No. 3. Jurnal masyarakat dan negara, hal. 112

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁸ Artinya, segala kekayaan alam yang ada di Indonesia oleh Negara untuk kepentingan rakyat Indonesia.⁹

Pemerintah telah berusaha untuk menertibkan penambangan liar yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satu bukti dengan terbitnya UU No. 22 tahun 2009 tentang migas disebutkan bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, serta kegiatan hilir migas yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga, yang tidak berizin merupakan tindak pidana.¹⁰

Kendatipun demikian, berbagai penambangan minyak bumi secara liar masih marak terjadi di Indonesia. Ultimatum tersebut masih dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu antara lain; penambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian utama karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia, keterlibatan *cukong* dan *backing*, ketidakharmonisan relasi antara perusahaan dengan masyarakat setempat dan krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Kebenaran seperti yang dikatakandalamkonseppemikira nasional politik ekonomi Tan Malaka bahwa untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, tentu menginginkan kemerdekaan Indonesia 100%, artinyakernerdekaanIndonesia benar-benar diakuiolehnegara intemasionaldan intervensiasing benarbenartiadadibumiIndonesiaini. Sepertialatproduksi yang dirampas olehpenjajahitu dikembalikan lagi dan rakyatIndonesiayang akan

⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIV, Pasal 33

⁹Yerrico Kasworo, *Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi?*, *Jurnal RechtsVinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, 29 desember 2015

¹⁰MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral RepublikIndonesia, UU No. 22 Tahun2009, tentangpedoman pelaksanaan kaidah tehnik pertambangan yang baik

membangun kembali alat-alat produksi yang telah dirampasnya. Alat produksi disini ialah perkebunan, tambang, dan kekayaan alam lainnya. dalam pandangan politiknya Tan Malaka menginginkan Indonesia menganut ideology sosialisme untuk menjalankan politik ekonornid and pada kapitalisme, karena Tan Malaka rnenganggapsosialismela yang pas dengankondisicultur dan pemikiran rakyat Indonesia.¹¹

Hal inilah yang terjadi pada penambangan minyak liar di Sumatera Selatan yang menempati posisi dominan dan daerah paling rawan penambangan minyak dan gas. Dengan akumulasi dari data grafik yang akan tergambar di bawah ini :



Sumber: Diolah dari Laporan Bareskrim Polri 2013

Gambar 1.2 *Illegal Tapping Jalur Pipa Minyak SPPP Tempino.*¹²

Dari data diatas menyatakan bahwa dari tahun 2011 terjadi 309 kasus di Kab. Musi Banyuasin, yang biasa diartikan hampir setiap hari terjadi kasus pencurian minyak bumi. Dapat dilihat bahwa angka yang yang paling tinggi, yang menduduki posisi paling mendominasi ialah Kab. Musi Banyuasin Salah satu wilayah penambangan minyak bumi terdapat di Provinsi Sumatera Selatan.

¹¹Argo SinggihPratama, *Pemikiran Politik ekonomi Tan Malaka dan Relevansinya di Indonesia*, 2018.

¹²*Illegal Tapping Jalur Pipa Minyak SPPP Tempino*, www.laporanbareskrimpolri2013 , diakses pada 15 Oktober 2019

Penambangan minyak, yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin sisa dari peninggalan Belanda tersebar di beberapa lokasi. Pada awal tahun 2008 terdapat sekitar 1.120 sumur minyak tua yang diantaranya 580 dikelola oleh warga setempat secara tradisional sedangkan 540 sisanya terlantar. Berdasarkan penelitian Kabupaten Musi Banyuasin, seperti di Sungai Angit (Babat Toman), Batang Hari Leko, Keluang, Panjering (Babat Toman) dan Mangun Jaya (Babat Toman) dan Bayat Ilir (Bayung Lencir).

Pada penambangan minyak bumi di Desa Sugai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, dengan kenyataan praktek penambangan terdapat beberapa aturan yang ada diantaranya, peraturan yang di buat oleh para pemilik modal, SOP yang harus di patuhi dalam proses penjualan hasil dari penambangan minyak yang ada, para pemilik modal menetapkan bahwa para penambang harus menjual hasil tambang minyaknya ke padaintasi/pt yang telah di tentukan. Tentu aturan ini sangat tidak memihak kepada rakyat terutama berdampak merugikan pada para penambang atau kelas masyarakat menengah kebawah, sebab para penambang bisa mendapat keuntungan lebih itu dari menjual hasil tambang secara eceran atau bebas, seharusnya aturan itu harus berpihak dan saling menguntungkan satu sama lain ketika memang adanya hubungan mutualisme.

Seperti yang telah di jelaska sebelumnya, Tan Malaka beramsumsi relevansi konsep politik ekonomi itu lebih kepada dasar ideolgy sosialisme, yang artinya memang setiap pergerakan yang di lakuka itu lebih kepada mementingkan

masyarakat di Indonesia terlebih dulu bukan malah lebih mementingkan urusan para korporasi asing saja. Kebenaran hal ini juga yang tidak berkesinambungan sesuai cultur Indonesia yang telah dikatakan oleh Karl Marx pada abad ke-19 “*the executive of modern government state is a committee for managing the affairs of the whole bourgeoisie*“(eksekutif negara pemerintahan modern hanyalah sebuah komite untuk mengelola urusan-urusan seluruh borjuis)”.¹³

Table: 1.1.
Data Jumlah Keadaan Sumur Minyak Tua Sisa Eksploitasi Peninggalan Belanda di Kabupaten Musi Banyuasin.

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Banyaknya Sumur Tua			Produksi (Barrel per hari)
			Dikelola Warga	Belum Dikelola	Jumlah	
1.	Babat Toman	Sungai angit	250	100	350	150
2.	Babat Toman	Mangun Jaya	-	150	150	0
3.	Babat Toman	Suban Burung	80	70	150	30
4.	Batang Hari Leko	Suban Burung	200	100	300	120
5.	Buyung Lencir	Bayat Ilir	50	20	70	50
6.	Keluang	Keluang	-	100	100	0
Jumlah			580	540	1.120	350

¹³Mohibul Haque (2011), “*Beyond liberalism: contemporary relevance of Marxism, Indian Journal of Political Science*”. Vol 45, hal.1-3, January-June, ISSN: 0303-9957.

Sumber: Pemetaan Sumur Minyak Tua (Dinas Pertambangan dan Nilai Ekonomis. Masalah terjadi Energi (Kab. Muba, 2008).¹⁴

Dari adanya lahan tambang minyak bumi di Kecamatan Babat Toman Desa Sungai Angit ini, memang telah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar dan menjadi sumber penghasilan. Bahkan, aktifitas tersebut juga telah merubah pola sumber mata pencaharian masyarakat yang sebelumnya bertumpu pada sektor pertanian beralih sebagai pengelola tambang minyak bumi.¹⁵

Berdasarkan uraian dan data diatas, maka dari itu peneliti berkeinginan kuat untuk menganalisa masalah penambang minyak di Desa Sungai Angit dengan judul “Tinjauan politik ekonomi dalam pengolahan minyak bumi di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pengolahan minyak bumi di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman?
2. Bagaimana tinjauan politik ekonomi dalam pengolahan minyak bumi di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman tersebut?

C. Tujuan Penelitian

¹⁴Yuswalina Adi Candra (2017) “*pemanfaatan sumur minyak tua sisa eksploitasi peninggalan Belanda dalam hubungannya dengan perekonomian masyarakat di Kab. Musi Banyuasin*”. Vol. 3 No. 1, Jurnal Muamalah, hal 23

¹⁵HM, tokoh agama Kelurahan Babat, wawancara tanggal 15 Januari 2020

Dengan melihat dari permasalahan yang ada di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pola pengolahan minyak bumi di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat toman.
2. Untuk mengetahui tinjauan politik ekonomi dalam pengolahan minyak bumi di Desa Sugai Angit Kecamatan Babat Toman.

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan suatu manfaat antaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan untuk dapat bermanfaat bagi pengetahuan dan keilmuan bagi kajian ilmu politik. Dari penelitian ini pula mampu memberikan pengetahuan bagi setiap pembaca, serta dapat di jadikan referensi yang nantinya untuk memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis dari penelitian ini dapat menjadi masukan/acuan pembaca, terhadap pengolahan dari penambangan minyak secara tradisional yang pantas menjadi landasan masyarakat dalam pemanfaatan SDA yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan ekonominya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan kajian kegiatan penelitian ini, peneliti menganalisis terhadap penelitian sebelumnya yang membahas mengenai (Tinjau politik

ekonomi dalam pengolahan minyak bumi di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin). Telah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya dan memiliki perbedaan terhadap penelitian, yang akan dibahas oleh peneliti, antara lain yaitu:

Pertama, penelitian dari peneliti Adimas Ramdhan, dengan judul *Politik Ekonomi Generasi Muda Implementasi Kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional di Jawa Timur*,¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) di Jawa Timur dari segi koordinasi, siapa saja yang bertindak sebagai implementor, hambatan serta siapa yang diuntungkan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian bagaimana pengorganisasian GKN yang dilakukan Dinkop Jatim dan HIPMI di Jawa Timur yang kemudian dianalisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Grindle.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengorganisasian GKN di Jawa Timur masih belum maksimal sehingga dampaknya pun juga tidak maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, adanya *miss communication* antara Dinkop dengan kementerian pusat, kredit macet yang terjadi dikarenakan jaminan yang digunakan hanyalah ijazah. Serta kurangnya minat para mahasiswa dan masyarakat dalam berwirausaha. Selain itu tidak berjalannya koordinasi antara Dinas Koperasi dengan HIPMI.

¹⁶Adimas Ramdhan (2012) "*Politik Ekonomi Generasi Muda Implementasi Kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional di Jawa Timur*". Vol 2 No 1. Jurnal Politik, hal 28

Dimana MoU yang telah disepakati tidak ditindak lanjuti sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Kedua, penelitian dari peneliti Ifdlolul Maghfur, dengan judul *Peran Politik Ekonomi Islam Dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*,¹⁷ Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2016 merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang telah dilakukan secara bertahap mulai KTT ASEAN di Singapura pada tahun 1992.

Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Konsekuensi atas kesepakatan MEA tersebut berupa aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Hal-hal tersebut tentunya dapat berakibat positif atau negatif bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu dari sisi pemerintah juga dilakukan strategi dan langkah-langkah agar Indonesia mampu dan dapat memanfaatkan momentum MEA.

Ketiga, penelitian dari peneliti Wasisto Rahardjo Jati, dengan judul *Manajemen Tata Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Pradigma Ekologi Politik*,¹⁸ Developmentalism masih merupakan perspektif dominan dalam mengelola sumber daya alam. Alam adalah aset ekonomi strategis yang memicu eksplorasi

¹⁷Ifdlolul Maghfur (2016) “*Peran Politik Ekonomi Islam Dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*”. Vol 14 No 2. Jurnal Hukum Islam, hal 15

¹⁸Wasisto Rahardjo Jati (2012)“*Manajemen Tata Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Pradigma Ekologi Politik*”. Vol 3 No 2. Jurnal Ilmu Politik, hal 23

dan eksploitasi kekayaan alam. Implikasinya adalah kerusakan lingkungan besar-besaran di banyak tempat. Ekologi Politik muncul sebagai perspektif alternatif dalam mengelola sumber daya alam untuk membangun sinergi antara alam dan hubungan manusia melalui kearifan lokal. Penjelasan ini meninjau secara singkat prospek dan tantangan ekologi politik sebagai paradigma alternatif dalam pengelolaan sumber daya alam.

Keempat, Penelitian dari Peneliti Lisman Setiawan Tanjung, dengan judul *Implikasi Kebijakan Politik Ekonomi Partai Terhadap Tingkat Elektabilitas Partai Dalam Pemilu*,¹⁹ kurs memiliki hubungan dengan elektabilitas partai, Kurs secara harian dapat dijadikan elektabilitas secara harian bagi partai pemerintah. Kurs yang paling signifikan menggambarkan elektabilitas partai pemerintah dan partai oposisi pemerintah adalah kurs Kyat Myanmar. Berdasarkan analisis atas teori *political business cycle*, kebijakan politik ekonomi yang paling cepat, efektif dan efisien adalah penyerapan anggaran pada Kementerian, Pekerjaan Umum dan Kementerian Agama, dengan sasaran inflasi dan pengangguran.

Berdasarkan analisis atas jenis pemilih, jenis pemilih yang dominan dan mayoritas di Indonesia adalah jenis pemilih rasional atau *rational choice* model (pemilih dengan pertimbangan - pertimbangan untung rugi dalam memilih partai politik atau calon presiden), bertipe *retrospective* atau retrospektif (melihat masa lampau). Kenaikan kurs Rupiah pasti disertai penurunan jumlah perolehan suara partai pemerintah bersamaan dengan kenaikan jumlah perolehan suara

¹⁹Lisman Setiawan Tanjung (2016) "*Implikasi Kebijakan Politik Ekonomi Partai Terhadap Tingkat Elektabilitas Partai Dalam Pemilu*". Vol 7 No 1. Jurnal Politika, hal 18

partai oposisi pemerintah, begitupun sebaliknya. Kurs Rupiah memiliki kekuatan sama dengan diatas.

Kurs dapat dijadikan indikator kecepatan, keefektifan dan keefisienan kebijakan politik ekonomi (ideologi politik ekonomi partai, sistem politik ekonomi partai, jenis politik ekonomi partai, program ekonomi partai dan demand atas politik ekonomi partai) bagi partai pemerintah dan presiden yang tengah berkuasa pada pemerintahan.

Kelima, Penelitian dari Peneliti Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, dengan judul *Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia*,²⁰ Di awal tahun 2012, pemerintah RI mengagendakan pencabutan subsidi harga BBM serta menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.500. Kebijakan ini mengundang aksi protes massa di berbagai daerah, hingga akhirnya ditunda pengesahannya melalui proses politik yang panjang. Sesuai draft yang disepakati di sidang paripurna DPR-RI, pemerintah berkesempatan menyesuaikan harga BBM jika harga Indonesian Crude Price (ICP) naik atau turun 15% dalam jangka waktu 6 bulan.

Kebijakan tersebut sesungguhnya masih menyisakan pertanyaan: mengapa harga BBM di Indonesia begitu tergantung dengan harga minyak dunia yang notabene oligopolistic Berger dkk, 1998. Paper ini akan mencoba melihat masalah ini dengan mengupas pengelolaan minyak Indonesia pasca-1998 dalam ranah kajian ekonomi politik internasional.

Dari penelitian terdahulu diatas, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai politik ekonomi, sedangkan

²⁰Ahmad Rizky Mardhatillah Umar (2012) "*Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia*". Vol 16 No 1. Jurnal Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik, hal 56

perbedaannya yaitu mengenai objek dan tempat yang diteliti. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu fokus pada Tinjauan politik ekonomi dalam pengolahan minyak bumi di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

F. Kerangka Teori

Para pemikir ekonomi terkemuka sudah dua abad lamanya berusaha memahami hal-hal pokok mengenai sosiologi ekonomi. Pembatasan ini sangat penting, karena sebagian besar abad ke 19 ilmu ekonomi itu disebut 'ekonomi politik' dan sekarang juga masih mempertahankan kegemarannya dengan isu-isu politik. Penulis dalam memotret ekonomi politik ini melalui tiga pemikiran besar bidang ekonomi politik diawali dari Taylor, Smith, dan Marx.

1. Merkantilisme Ekonomi Negara

Paham merkantilisme adalah sekelompok ide heterogen yang mendominasi pemikiran ekonomi Eropa selama abad ke 17 dan 18. Ide-ide ini bukanlah merupakan suatu teori ekonomi yang utuh, melainkan suatu kumpulan besar (*conglomeration*) pendapat-pendapat mengenai nilai, saran-saran kebijakan, dan pernyataan-pernyataan mengenai sifat kehidupan ekonomi.

Negara adalah tempat (*locus*) kekuasaan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kekayaan, negara hendaklah memakai kekuasaan ini untuk mengatur industri dan perdagangan. Negara harus memberikan sokongan politik dan ekonomi misalnya dengan menetapkan monopoli terhadap industri yang membuat barang-barang untuk ekspor. Negara harus membatasi impor dengan mengenakan pajak atau melarang impor tersebut. Negara harus menjajah

(*colonize*) untuk memperoleh suplai emas dan perak, ataupun untuk memperoleh bahan mentah yang dapat diolah untuk diekspor.

Dengan meningkatkan kekayaannya, negara itu juga meningkatkan kekuasaannya. Dari sudut status variabel ekonomi dan politik, kaum merkantilist tidak berbeda teorinya dengan Negara. Dengan meningkatkan kekayaan suatu negara maka meningkatlah kekuasaannya. Di samping itu, ia menggunakan kekuasaannya untuk meningkatkan kekayaannya. Jika dikendalikan dengan tepat, sistem ekonomi dan politik itu tidak akan bertentangan dengan tujuan sebuah negara, malahan saling mengisi satu sama lain.

2. Melemahnya Kontrol Ekonomi Negara

Smith (1723-1790) adalah kritikus terkemuka dan doktrin merkantilist. Polemik multi segi yang termuat dalam bukunya yang termasuk *Wealth of Nations* (kekayaan bangsa-bangsa). Mengenai kekayaan, Smith menolak penekanan merkantilist terhadap uang dan harta. Ia mengemukakan bahwa kekayaan suatu bangsa itu dijumpai dalam basis produksinya, atau dalam kekuatannya untuk menghasilkan 'barang-barang keperluan, kesenangan dan kemudahan hidup. Uang adalah alat pertukaran yang memudahkan alokasi barang-barang tersebut. Smith juga merevisi ide merkantilist mengenai hubungan antara kekayaan dengan kekuasaan. Walaupun ia tidak membantah bahwa kekuasaan suatu negara itu sebagian bergantung pada kekayaannya, namun ia menyerang pendapat bahwa cara terbaik untuk meningkatkan kekayaan adalah melalui tindakan politik langsung.

3. Negara Sebagai Tawanan Borjuis

Pemikiran Marx(1818:76-89) itu sangat kompleks, disini kita hanya dapat memberikan sketsa sederhana saja mengenai pandangannya tentang ilmu ekonomi dan masyarakat, dengan rujukan khusus pada pernyataannya mengenai kekuatan-kekuatan politik. Marx mengasumsikan bahwa kelas kapitalis itu memiliki akses pada kekuasaan, karena posisinya dalam struktur ekonomi. Ia memiliki alat-alat produksi, dania membeli jasa- jasa buruh. Sebaliknya, buruh hanya memiliki tenaga kerja untuk dijual dan hanya upah yang diterimanya sebagai imbalan. Karena posisinya yang unggul kaum kapitalis sanggup mengeksploitir buruh dengan memperpanjang jam kerja, memaksa istri dan anak- anak untuk bekerja, mempercepat mesin-mesin, dan mengganti buruh dengan memasang mesin yang lebih produktif. Kekuasaan kapitalis semakin diperkuat oleh penguasa politik yang mengeluarkan undang- undang yang merugikan para buruh dan memadamkan setiap usaha protes. Dalam keadaan demikian, kekuatan politik dalam masyarakat inidimasukkan jasa-jasa kekuatan ekonomi.

Marx (1754:342) mengungkapkan bahwa mempertahankan hubungan antara kekuatan ekonomi dan politik itu bukanlah suatu kekuatan yang langgeng. Karl Marx mem-punyai pandangan yang kompleks tentang hubungan antara kekuatan ekonomi dan politik. Dalam tahap vital perkembangan suatu sistem ekonomi, pengaturan politik mendukung pengaturan ekonomi dalam tahap regenerasi, kekuatan ekonomi dan politik saling bertentangan, dan konflik ini akhirnya membawa kepada sistem politik itu dan kemudian kehancuran sistem

ekonominya. Pada setiap waktu, hubungan fungsional antara kekuatan ekonomi dan politik itu bergantung pada tahap perkembangan masyarakat tersebut.²¹

Menurut Caporaso & Levine dalam Deliarnov (2006:8) pemaknaan terhadap ekonomi politik tidak terbatas pada studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Pada awalnya ekonomi politik dimaksudkan untuk memberi saran mengenai pengelolaan masalah ekonomi kepada penyelenggara negara. Ekonomi politik oleh pakar Ekonomi Politik Baru lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap proses politik. Dalam hal ini mereka mempelajari institusi politik sebagai keberadaan yang bersinggungan dengan keputusan ekonomi politik yang berusaha memengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, baik untuk kepentingan kelompoknya atau masyarakat.

Teori - teori ekonomi politik. Teori ekonomi politik telah berkembang pesat karena dianggap relevan dengan praktik formulasi kebijakan maupun kegiatan ekonomi sehari-hari. Salah satu sumber kemajuan ekonomi politik juga berasal dari gagalnya teori ekonomi konvensional untuk memetakan dan mencari solusi persoalan-persoalan ekonomi. Banyak persoalan ekonomi yang gagal merampungkan masalah pendekatan ekonomi konvensional yang gagal.

Pendekatan ekonomi politik baru yang menganggap Negara/pemerintah, politisi, atau birokrat sebagai agen yang memiliki kepentingan sendiri merupakan pemicu lahirnya pendekatan *public choice* atau *rational choice*. *Public choice* tergolong ke dalam kelompok ilmu politik baru yang berusaha mengkaji tindakan rasional dari aktor – aktor politik, baik di lembaga parlemen,

²¹Yunus Handoko (2013). “*Pemikiran Ekonomi Politik Taylor, Smith, Mar*”. Vol 7 No 2, DosenSTIEAsiaMalang, hal 2- 4

pemerintah, lembaga kepresidenan, masyarakat pemilih, dan lain sebagainya. Teori pilihan publik ini mendeskripsikan bahwa “secara tipikal ahli ekonomi politik melihat politik dalam wujud demokrasi, yang memberi ruang untuk saling memelurkan pertukaran diantara masyarakat, partai politik, pemerintah dan birokrat.”

Dalam konsep tersebut masyarakat pemilih di posisikan sebagai pembeli barang – barang kolektif (publik) sedangkan pemerintah dan partai politik di pertimbangkan sebagai alternatif penyedia kebijakan publik”(barang dan jasa). Sehingga dalam jangka panjang mereka bisa memungut dukungan dari pemilih lewat pemilihan umum. Banyak pandangan menyatakan bahwa teori pilihan publik hanya ampuh di gunakan untuk setiap formulasi kebijakan dan dukungan di anggap sebagai proses distribusi nisbah ekonomi melalui pasar politik. Pada level yang lebih luas, teori pilihan publik biasa di terjemahkan sebagai aplikasi metode ekonomi terhadap politik. Secara esensi teori pilihan publik berusaha untuk mengaplikasikan perangkat analisis ekonomi kedalam proses non pasar atau politik di bawah formulasi dan implementasi kebijakan publik.

Teori pilihan publik berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional, perbedaan tersebut bukan dalam hal konsepsinya terhadap individu dan aspek kekuatan motivasi melainkan dalam hal rintangan-rintangan dan kesempatan-kesempatan yang datang dari sisi politik (sebagai lawan pasar). Dalam pendekatan yang spesifik ekonomi sebagai pertukaran pasar, produksi, konsumsi dan politik menganalisis interaksi para pelaku dalam lembaga-lembaga yang

sudah mapan seperti amerika serikat(US). Dalam level analisis teori pilihan publik dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu :

- a. Teori pilihan publik normatif, yaitu teori yang fokus pada isu-isu yang terkait dengan desain politik dan aturan-aturan politik dasar.
- b. Teori pilihan publik positif, yaitu teori yang mengkonsentrasikan untuk menjelaskan perilaku politik yang dapat diamati dalam wujud teori pilihan.

Empat asumsi umum lainnya dalam teori pilihan publik yaitu :

- a. Kecukupan kepentingan material individu memotivasi adanya perilaku ekonomi.
- b. Motif kecukupan tersebut lebih mudah dipahami dengan menggunakan teori ekonomi neoklasik.
- c. Kecukupan kepentingan material individu yang sama memotivasi adanya perilaku politik.
- d. Asumsi kecukupan kepentingan yang sama tersebut lebih mudah dipahami dengan menggunakan teori ekonomi neoklasik.

Teori pilihan publik secara umum digunakan dalam berbagai disiplin ilmu dengan nama yang berbeda seperti ; *Public choice* (ilmu politik), *Rational choice theory* (ilmu ekonomi dan sosiologi), *Expected utility theory* (ilmu psikologi). Pengertian rasional tersebut diaplikasikan ke dalam banyak konsep, diantaranya ;

Keyakinan (*beliefs*), Preferensi (*preferences*), Pilihan (*choices*), Tindakan (*actions*), Pola perilaku (*behavioral patterns*), Individu (*persons*).²²

Pada bagian ini, penulis menguraikan latar belakang penelitian ini dengan berangkat dari pembacaan teori Pilihan Rasional (*Rational Choice*) dari John Elster. Praktek penambangan minyak bumi yang dianggap ilegal yang mengacu pada penggunaan sebagian tata kelola masih sederhana dan tradisional sebagai sumber mata pencaharian.

Disisi lain, meluasnya intervensi dan kontrol negara melalui pemerintah Kab. Musi Banyuasin terhadap praktek penambangan minyak bumi sumur tua dan tradisional di Kecamatan Babat Toman Desa Sungai Angit. Pengolahan secara tradisional yang dilakukan oleh warga setempat bukan hanya menimbulkan berbagai efek negatif terhadap lingkungan, keselamatan kerja namun juga berakibat pada pengurangan pendapatan negara melalui pajak. Maka dalam meneliti pengolahan minyak bumi sumur tua dan tradisional di Kecamatan Babat Toman Desa Sungai Angit. Menggunakan pilihan rasional (*rational choice*) oleh Jhon Elster dengan deskriptif kualitatif.

Menurut John Elster dalam bukunya yang begitu populer “Teori-Teori Ekonomi Politik” pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor yang mempunyai beberapa konsep yang terkandung didalamnya yaitu

²²Mohammad Maiwan (2018), “*Teori – Teori Politik Internasional Dalam Perbincangan aliran Dan Pandangan*”. Universitas Negeri Jakarta, hal 115

keinginan (*preference*) atau tujuan, keyakinan (*belief*), peluang dan tindakan.²³ Dengan kalimat lain, bahwa teori pilihan rasional orang-orang bertindak secara sengaja kearah suatu tujuan, dengan tujuan tersebut terbentuk sebuah nilai-nilai atau pilihan.

Oleh karena itu, setiap manusia ketika memilih tindakan didasari oleh nalar rasional, memaksimalkan kegunaan, memuaskan keinginan dan kebutuhan.²⁴ Didalam praktik penambangan minyak bumi yang terjadi di Desa Sungai Angit, dimana para pengolahan tambang yang berfokus pada kelompok selalu beradaptasi dengan cara tertentu sesuai dengan perubahan dalam ekonomi-politik di suatu wilayah tertentu. Analisis ini berlanjut dengan asumsi bahwa para pengelola dan pemilik modal dalam mengelola penambangan minyak memiliki preferensi atau keinginan dalam mencerminkan tindakan antara kelompok tertentu dalam ekonomi. Kelompok-kelompok ini dapat muncul di sepanjang garis kelas atau sektoral.

Teori pilihan rasional (*Rational Choice*) dari John Elster diterapkan untuk menjelaskan bagaimana kelompok-kelompok tertentu dalam ekonomi muncul dan apa tujuan dan preferensi keinginan mereka pada aktiviitas ekonomi. Selain itu, pilihan rasional menyediakan penjelasan untuk memahami koalisi kelompok dan interaksinya dengan lembaga lain. Dalam hal ini lebih merujuk kepada pemilik modal dalam merespon pihak negara terhadap peraturan pemerintah.²⁵

G. Metode Penelitian

²³Jamesa. Caporaso dan David P. Levine.(2015).*Teori-teoriekonomipolitik*, yogyakarta : pustaka pelajar, h.307.

²⁴John Baylis and Steve Smith. (2001). *The Globalization of World Politics*, New York : Oxford University Press, h. 336.

²⁵Ramlan Surbakti. (2005). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Grasindo, h. 205.

Di dalamnya kami mempelajari berbagai hal langkah-langkah yang umumnya diadopsi oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitian bersama dengan logika di belakang mereka, para peneliti perlu mengetahui tidak hanya metode / teknik penelitian tetapi juga metodologi.²⁶Berikut ini metode yang akan digunakan :

1. Pendekatan/ metode penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, yaitu penelitian termasuk turun langsung kelapangan dan pencarian fakta pertanyaan dari jenis yang berbeda dan tujuan dari penelitian tipe ini adalah menggambarkan keadaan seperti yang telah terjadi saat ini, dan peneliti hanya bisa melaporkan apa yang telah terjadi.²⁷Dalam penelitian ini letak deskriptifnya berupa uraian kalimat yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang benar-benar ada serta berkaitan dengan Tinjauan politik ekonomi dalam pengolahan minyak bumi di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sebab pendekatan ini menganalisis dengan cara menggambarkan/mendeskripsikan sudut pandang atau interpretasi individu (informal) dalam latar alamiah.²⁸Prosedur dari penelitian bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata atau kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Data dan Sumber data

²⁶C.R Kothari, (1990). *Research Methodologi, Methods adan Techniques (Second Revises Edition)*, India: Age International, h. 8.

²⁷*Ibid*, C.R Kothari, h. 2– 3.

²⁸Nanang Martono. (2016). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 10.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh langsung dari para informan (orang yang memberikan informasi) dalam penelitian ini yaitu : perwakilan unsur pemerintah, perwakilan unsur pemilik modal, beberapa tokoh masyarakat Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman.

Kemudian data Sekunder, data ini merupakan data pendukung/penunjang dari data primer seperti buku, jurnal, himbauan-himbauan, foto-foto, dokumen dan berita sehingga dapat mendukung yang berkaitan dengan analisis pemerintah lokal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, suatu metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian²⁹. Proses dalam wawancara adalah tanya jawab secara lisan oleh dua orang atau lebih untuk mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan, wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang rinci, berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi dari pemerintah lokal, pemilik modal dan masyarakat Kecamatan Babat Toman Desa Sungai Angit. Setelah itu peneliti akan mencatat atau merekam baik rekaman suara ataupun video sesuai kebutuhan lapangan untuk menjadi bukti dan data dari hasil wawancara tersebut.

b. Observasi

Dari teknik pengumpulan data ini, peneliti telah melakukan survei terlebih dahulu mengenai lokasi penelitian. Lokasi dari dilakukannya pengolahan minyak

²⁹Sutrisno Hadi, (1987), *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset h. 193.

bumi secara tradisional ini, cukup memprihatinkan seperti apa yang telah di jelaskan terlebih dahulu di bagian latar belakang. Terdapat beberapa kerusakan alam, lingkungan dan memang tidak bisa di pungkiri pula, adanya peningkatan ekonomi dari pengelolaan minyak bumi tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.³⁰ Pengumpulan data yang akan dilakukan dengan mengadakan kajian dokumen untuk membantu menunjang data penelitian seperti foto-foto, arsip, berita-berita, video himbauan-himbauan, maupun catatan-catatan yang berhubungan dengan Tinjauan politik ekonomi dalam pengelolaan minyak bumi secara tradisional di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di lakukan di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Muba, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Penetapan lokasi penelitian yang merupakan tahap sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti tujuan bisa ditetapkan sehingga mempermudah peneliti melakukan penelitiannya, sedangkan fokus dari penelitian ini adalah Politik Ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

5. Teknik Analisis Data

a) Pengumpulan Data

³⁰Nanang Martono. (2016). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 80.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari informan, data tersebut berisi tentang hasil tanya jawab dengan informan yang ditulis secara lengkap, serta dokumentasi, hasil dari data yang diperoleh tersebut kemudian dicatat dan dikumpulkan,

b) Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakkan, dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan, bila proses ini dilakukan di akhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang harus disaring. pada tahap ini peneliti menyaring informasi yang didapat melalui wawancara dari informan.

c) Penyajian Data

Penyajian data berupa aktifitas menyajikan data hasil penelitian sehingga memungkinkan peneliti mengambil keputusan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh, penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data kompleks keadaan kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah untuk dipahami.

d) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses aktifitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktifitas sebelumnya yaitu data yang telah direduksi atau yang telah disajikan.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk memudahkan penulisan, maka sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab dengan penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Babat Toman Desa Sungai Angit dengan digambarkan lokasi ini berdasarkan pada topik yang penulis teliti.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan mengenai analisis dan pemaknaan dari data yang di peroleh. Selanjutnya dari penelitian yang peneliti dapat akan di analisa dengan teori Rational Choice (individual).

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari permasalahan peneliti, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti.